

ABSTRAK

Diah Siti Sa'diah, 3190110016. *Konstruksi Batas Pergeseran Peran Ibu Rumah Tangga Karir dan Aktifis Organisasi Keagamaan di Kabupaten Bandung dan Pengembangannya dalam Sistem Hukum Nasional.*

Penelitian ini berangkat dari krisis epistemologis karena adanya kesenjangan antara realitas pergeseran peran ibu rumah tangga dalam masyarakat yang progresif dengan norma tekstual yang statis (pembagian peran dan kewajiban suami istri dalam UU No.1 Tahun 1974 serta KHI). Persoalan terletak pada bagaimana batas peran diletakkan agar mashlahat tetap terjaga dan keluarga tidak kehilangan arah. Sebagaimana kritik nalar Arkoun terhadap pembekuan nalar fikih karena menempatkan konstruksi historis sebagai kebenaran final, maka pembacaan ulang berbasis *maqāsid al-syarī'ah* menjadi keniscayaan agar hukum tidak berhenti pada legalitas formal, melainkan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan keluarga secara substantif. Namun *maqāsid* memerlukan instrumen operasional yang mampu menentukan batas normatif perubahan, sehingga teori *hudūd* Syahrur menjadi relevan sebagai kerangka penetapan batas minimal–maksimal pergeseran peran ibu rumah tangga. Ketiadaan konstruksi batas tersebut menyebabkan hukum keluarga berada dalam ruang ambigu antara pelestarian norma dan tuntutan perubahan, sehingga penelitian ini menempatkan indeks mashlahat dan teori batas sebagai upaya rekonstruksi yuridis-filosofis untuk menjembatani ketegangan antara teks, konteks, dan tujuan hukum

Penelitian ini bertujuan untuk : 1)menganalisis fenomena pergeseran peran ibu rumah tangga karir dan sebagai aktivis organisasi keagamaan di Kab.Bandung;2) memformulasikan dan merancang indeks mashlahat pergeseran peran ibu dalam rumah tangga;3) menganalisis dan menentukan batas pergeseran peran ibu rumah tangga berdasarkan teori batas Syahrur;4)menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran peran ibu rumah tangga;5) menganalisis kontribusi indeks mashlahat dan batas pergeseran berdasarkan teori limit Syahrur terhadap pengembangan sistem hukum nasional.

Penelitian ini menggunakan teori *maqāshid al-syariah*, dan teori dekonstruksi rekonstruksi Arkoun sebagai *grand theory*, teori *shifting paradigm*, teori *social role* dan pembaharuan hukum keluarga sebagai *middle theory*, dan teori limit Syahrur sebagai *applied theory*

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, metode deskriptif analitis dengan studi kasus di Kabupaten Bandung. Lokasi & subjek: ibu berkarier dan/atau aktivis ormas keagamaan. Sampling: *Purposive-stratified*. Instrumen:Kuesioner *indeks maqāsid* keluarga ;Pedoman wawancara melalui G.Form.Analisis:Kuantitatif (sederhana untuk indeks mashlahat);Kualitatif (*thematic analysis, pattern matching* dengan kerangka *hudūd-ḥanifiyyah*);*Legal analysis*: interpretasi sistematis–teleologis pasal terkait dan komparasi dengan kerangka *maqāsid*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Pergeseran peran dapat berjalan harmonis sepanjang berada dalam kerangka nilai agama, izin suami, komunikasi, dan keseimbangan peran;2)formulasi batas berbasis mashlahat dilakukan melalui kajian terhadap teks fiqh terutama analisis nilai dan fungsi keluarga, memperhatikan keseimbangan peran domestik dan publik, prinsip *lā dharar wa lā dhirār*, prinsip *idā dhāqa al-amru ittasa' wa idzā ittasa'a dhāqa, maqāshid al-syariah* dengan tingkatan mashlahatnya, serta nilai fleksibilitas dan kontekstualitas. Indeks mashlahat digunakan sebagai alat evaluasi normatif atas peran tambahan ibu di sektor publik berdasarkan *maqāshid al-syariah* dan *mashlahat* (disertai aspek psikologis dan sosiologis). Penelitian menunjukkan 39% responden berada di kategori *Mashlahah Optima/A'liyah*, 46% *Mashlahah Moderat/Mu'tadilah*, dan 15% *Rawan Mafsadah/Mashlahah naqishah*.;3)batas pergeseran peran ibu dalam rumah tangga berasarkan teori limit Syahrur adalah selama seorang perempuan tetap berada dalam ruang di antara *hudūdullah* dan garis *hanifiyyah*, ia memiliki kebebasan bertindak secara kontekstual dan dinamis, tanpa melanggar nilai dasar yang digariskan wahyu. Penelitian menunjukkan fenomena pergeseran berada pada model kurva *halah hadd al'ala wa al adna ma'an*; 4) Kajian hukum Islam menunjukkan bahwa prinsip *qiwamah* dan pembagian peran suami–istri tidak bersifat kaku dan absolut. Sejumlah pandangan ulama menegaskan bahwa kewajiban domestik istri lebih bersifat moral-etis daripada kewajiban hukum yang memaksa. Oleh karena itu, pertukaran dan pembagian peran dalam rumah tangga dimungkinkan sepanjang didasarkan pada musyawarah, kesepakatan bersama, dan tidak menimbulkan kemafsadatan keluarga.5) Kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum nasional adalah bahwa .Indeks mashlahat dapat menjadi instrumen akademik yang menilai batas mashlahat peran istri dalam rumah tangga, sedangkan teori limit Syahrur memberikan kerangka fleksibilitas syariat yang memungkinkan reinterpretasi peran suami dan istri secara kontekstual. Hasil penelitian ini sejalan dengan agenda global seperti SDG 5 dan CEDAW, sehingga menegaskan perlunya pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang lebih responsif terhadap keadilan gender tanpa meninggalkan *maqāsid al-syarī'ah*. Hasil penelitian mendorong rekontekstualisasi pasal-pasal dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), agar lebih sesuai dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesetaraan.

Kata Kunci : Pergeseran Peran, Konstruksi Batas, Indeks Mashlahat, Limit Syahrur, Hukum Keluarga Nasional

ABSTRACT

Diah Siti Sa'diah, 3190110016. *The Construction of Islamic Law on the Shifting Limit of the Role of Career Housewives and Religious Organizational Activists in Bandung Regency and Its Development within the National Legal System*

This research originates from an epistemological crisis arising between the reality of shifting roles of housewives within a progressive society and static textual legal norms, particularly those regulating the division of rights and obligations between husband and wife as stipulated in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). The central issue lies in determining the normative boundaries of women's roles in order to preserve *maṣlaḥah* and prevent the family institution from losing its moral and functional direction. In line with Mohammed Arkoun's critique of the stagnation of Islamic legal reasoning caused by the absolutization of historical constructions as final truths, a re-reading of family law based on *maqāṣid al-sharī'ah* becomes indispensable. Law must not merely function as formal legality, but should be oriented toward the substantive protection of family welfare. However, *maqāṣid* requires an operational instrument capable of determining normative limits of change. In this regard, Syahrur's *ḥudūd* (limit) theory becomes relevant as a framework for defining the minimum and maximum boundaries of role shifting among housewives. The absence of such boundary construction has placed family law in an ambiguous space between normative preservation and the demands of social transformation. Therefore, this study positions the *maṣlaḥah* index and limit theory as a juridical–philosophical reconstruction aimed at bridging the tension between text, context, and the objectives of Islamic law.

This study aims to: (1) analyze the phenomenon of role shifting among career housewives and religious organization activists in Bandung Regency; (2) formulate and design a *maṣlaḥah* index for role shifting within the household; (3) analyze and determine the limits of role shifting based on Syahrur's limit theory; (4) examine Islamic legal perspectives on the shifting roles of housewives; and; (5) analyze the contribution of the *maṣlaḥah* index and role-limit construction to the development of the national legal system.

This research employs *maqāṣid al-sharī'ah* theory and Arkoun's deconstruction–reconstruction theory as grand theories; shifting paradigm theory, social role theory, and family law reform as middle-range theories; and Syahrur's limit theory as the applied theory.

The study adopts a qualitative approach using a juridical-empirical method and descriptive-analytical design, with a case study conducted in Bandung Regency. The research subjects consist of career women and/or activists in religious organizations. Sampling was conducted through purposive–stratified techniques. Data collection instruments included a family *maqāṣid* index questionnaire and interview guidelines administered via Google Forms. Data analysis comprised simple quantitative analysis for the *maṣlaḥah* index, qualitative thematic analysis and pattern matching using the *ḥudūd–ḥanīfiyyah* framework, as well as legal analysis through systematic–teleological interpretation and comparative *maqāṣid*-based review of relevant legal provisions.

The findings reveal that: (1) role shifting may operate harmoniously provided it remains within religious values, spousal consent, effective communication, and balanced role distribution; (2) the formulation of role boundaries based on *maṣlaḥah* is conducted through an analysis of *fiqh* texts emphasizing family values and functions, balance between domestic and public roles, the principle of *lā ḍarar wa lā ḍirār*, the principle of *idhā ḍāqa al-amr ittasa'a wa idhā ittasa'a ḍāqa*, levels of *maqāṣid*-based *maṣlaḥah*, and contextual flexibility. The *maṣlaḥah* index functions as a normative evaluative instrument for additional public roles of wives, incorporating *maqāṣid* considerations alongside psychological and sociological aspects. The study shows that 39% of respondents fall within the Optimal (A'liyah) *Maṣlaḥah* category, 46% within the Moderate (Mu'tadilah) category, and 15% within the Vulnerable to Mafsadah (Nāqīṣah) category; (3) based on Syahrur's limit theory, the permissible boundary of role shifting exists as long as women remain within the space between *ḥudūd Allāh* and the line of *ḥanīfiyyah*, allowing contextual and dynamic action without violating foundational revelatory values. The phenomenon corresponds to the curve model of *ḥālah ḥadd al-'lā wa al-adnā ma'an*; (4) Islamic legal analysis indicates that the principle of *qiwāmah* and the division of spousal roles are neither rigid nor absolute. Many scholars assert that domestic duties of wives are ethical–moral responsibilities rather than legally coercive obligations. Consequently, role exchange and distribution within marriage are permissible so long as they are grounded in deliberation, mutual agreement, and the avoidance of family harm; and (5) with respect to national legal development, the *maṣlaḥah* index may serve as an academic instrument for evaluating the permissible limits of wives' public roles, while Syahrur's limit theory provides a flexible framework enabling contextual reinterpretation of marital roles. These findings align with global agendas such as SDG 5 and CEDAW, thereby reinforcing the urgency of reforming Indonesian family law to become more responsive to gender justice without departing from *maqāṣid al-sharī'ah*. This research encourages the recontextualization of provisions within the Marriage Law, particularly Article 31 paragraph (3) and Article 34 paragraph (2), to better reflect the principles of deliberation, justice, and equality.

Keywords: Role Shifting, Limit Construction, *Maṣlaḥah* Index, Syahrur's Limit Theory, National Family Law

ملخص

دراسة في الفقه الإسلامي

حول حدود التحويل لدور ربات العمل والأنشطة التنظيمية الدينية في منطقة باندونغ وتطوره في النظام القانوني الوطني

تنتقل هذه الدراسة من أزمة إبستمولوجية ناجمة عن التوتر بين واقع تحوّل أدوار ربّات البيوت في المجتمع المعاصر المتغيّر، وبين النصوص القانونية ذات الطابع الساكن، ولا سيما ما يتعلّق بتقسيم الحقوق والواجبات بين الزوجين في القانون رقم (1) لسنة 1974 ومجموعة الأحكام الشرعية (KHI) وتكمن الإشكالية الرئيسة في تحديد الحدود المعيارية لتحوّل الدور بما يضمن حفظ المصلحة وعدم انحراف مؤسسة الأسرة عن مقاصدها الأساسية. وانسجامًا مع نقد محمد أركون لتجميد العقل الفقهي نتيجة تحوّل البنى التاريخية إلى حقائق نهائية، فإن إعادة قراءة قانون الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية تُعدّ ضرورة منهجية، بحيث لا يقتصر القانون على الشريعة الشكلية، بل يتجه نحو تحقيق المصلحة الأسرية على نحو جوهري. غير أنّ المقاصد تحتاج إلى أداة تشغيلية قادرة على تحديد الحدود المعيارية للتغيّر، وهو ما يجعل نظرية الحدود لمحمد شحرور إطارًا مناسبًا لتحديد الحدّين الأدنى والأقصى لتحوّل أدوار ربّات البيوت. إن غياب هذا البناء الحديّ أدّى إلى وضع قانون الأسرة في منطقة رمادية بين المحافظة على النص ومطالبات التحوّل الاجتماعي، ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى توظيف مؤشر المصلحة ونظرية الحدود بوصفهما مدخلًا لإعادة البناء الفقهي-القانوني الذي يجسر العلاقة بين النص والسياق ومقاصد التشريع. تهدف هذه الدراسة إلى:

- (1) تحليل ظاهرة تحوّل أدوار ربّات البيوت والعملات والناشطات في المنظمات الدينية في إقليم باندونغ؛ (2) صياغة وتصميم مؤشر المصلحة لتحوّل الدور داخل الأسرة؛
 - (3) تحديد حدود هذا التحوّل استنادًا إلى نظرية الحدود لشحرور؛ (4) دراسة الموقف الفقهي الإسلامي من تحوّل أدوار ربّة البيت؛
 - (5) تحليل إسهام مؤشر المصلحة ونظرية الحدود في تطوير النظام القانوني الوطني.
- تعتمد الدراسة على نظرية مقاصد الشريعة ونظرية التفكيك وإعادة البناء عند أركون بوصفهما نظريتين كليتين (Grand Theory)، وعلى نظرية تحوّل النموذج المعرفي، ونظرية الدور الاجتماعي، وتجديد قانون الأسرة كنظريات وسطى (Middle Theory)، وعلى نظرية الحدود لشحرور كنظرية تطبيقية. وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الكيفية ذات المقاربة القانونية-الاجتماعية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة في إقليم باندونغ. وشملت العيّنة ربّات البيوت العاملات وأو الناشطات في المنظمات الدينية، وتم اختيارها وفق أسلوب العيّنة القصدية الطبقية. وأسُخدمت استبانة مؤشر مقاصد الأسرة، وأدلة المقابلات عبر نماذج إلكترونية. أما التحليل فشمّل التحليل الكمي البسيط لبناء مؤشر المصلحة، والتحليل الكيفي الموضوعي، والمطابقة المنطقية وفق إطار الحدود والحفنية، إضافة إلى التحليل القانوني القائم على التفسير النسقي والغائي والمقارنة المقاصدية. وتوصّلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

- (1) يمكن لتحوّل الدور أن يسير بانسجام متى التزم بالقيم الدينية، وموافقة الزوج، والتواصل الأسري، والتوازن بين الأدوار؛
- (2) يتم بناء حدود المصلحة من خلال تحليل النصوص الفقهية، مع التركيز على قيم الأسرة ووظائفها، والتوازن بين المجالين المنزلي والعام، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، ومستويات المقاصد، وقيم المرونة والسياقية؛ (3) يُستخدم مؤشر المصلحة كأداة معيارية لتقييم الأدوار الإضافية للزوجة في المجال العام استنادًا إلى المقاصد الشرعية، مع مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية. وقد أظهرت النتائج أن 39٪ من المبحوثات يعن في فئة المصلحة العليا، و46٪ في فئة المصلحة المتوسطة، و15٪ في فئة المصلحة الناقصة المعرضة للمفسدة؛
- (4) تُحدّد حدود تحوّل الدور وفق نظرية شحرور ما دامت المرأة تتحرك ضمن المجال الواقع بين حدود الله وخط الحنيفية، بما يسمح بحرية الفعل السياقي والديناميكي دون الإخلال بالقيم الوحيانية الأساسية، وقد اتّخذت الظاهرة نموذج منحني الحد الأعلى والأدنى معًا؛ (5) تؤكد الدراسة الفقهية أن مبدأ القوامة وتقسيم الأدوار الزوجية ليسا جامدين ولا مطلقين، وأن كثيرًا من الفقهاء يرون أن الواجبات المنزلية للزوجة ذات طابع أخلاقي قيم لا إلزامًا قانونيًا، ومن ثمّ فإن تبادل الأدوار وتقاسمها جائز شرعًا متى قام على التشاور والتراضي وانقاء المفسدة؛
- (6) تسهم نتائج الدراسة في تطوير النظام القانوني الوطني من خلال جعل مؤشر المصلحة أداة أكاديمية لتقييم حدود الدور الأسري للزوجة، بينما توفر نظرية الحدود إطارًا تشريعيًا مرناً لإعادة تفسير أدوار الزوجين بصورة سياقية. كما تتقاطع هذه النتائج مع الأبحاث العالمية مثل الهدف الخامس للتنمية المستدامة (SDGs) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، بما يؤكد ضرورة تجديد قانون الأسرة في إندونيسيا ليكون أكثر استجابة للعدالة الجنسانية دون الإخلال بمقاصد الشريعة الإسلامية، مع الدعوة إلى إعادة سياقية مواد قانون الزواج، ولا سيما المادة (31/3) والمادة (2/34).

الكلمات المفتاحية:

تحوّل الأدوار، بناء الحدود، مؤشر المصلحة، نظرية الحدود لشحرور، قانون الأسرة الوطني